

Capaian Pelaksanaan Kinerja Program dan Kegiatan Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan										
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi								
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan : %)	100	100.00	100.00	Belum Optimalnya Inventarisasi Sarana Prasara Perkantoran Dalam Menunjang Kelancaran Tugas Dan Fungsi Admisisntrasi Perangkat Daerah (kebutuhan Sarana Dan Prasarana Laboratorium Lingkungan)	Melaksanakan Inventarisasi Ketersediaan Sapras Perkantoran Serta Mengusulkan/merencanakan Penyediaan Sapras Dan Penyiapan Anggaran Pada Tahun Berikutnya		
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan : %)	100	100.00	100.00	Belum Optimalnya Inventarisasi Sarana Prasara Perkantoran Dalam Menunjang Kelancaran Tugas Dan Fungsi Admisisntrasi Perangkat Daerah (kebutuhan Gedung Kantor)	Melaksanakan Inventarisasi Ketersediaan Sapras Perkantoran Serta Mengusulkan/merencanakan Penyediaan Sapras Dan Penyiapan Anggaran Pada Tahun Berikutnya		
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan : %)	100	100.00	100.00	Belum Optimalnya Inventarisasi Sarana Prasara Perkantoran	Melaksanakan Inventarisasi Ketersediaan Sapras Perkantoran	-	
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan : %)	100	100.00	100.00	Belum Oprimalnya Proses Keppemilikan Lahan Persemaian Pada Uptd Spth	Berkoordinasi Dan Mengusulkan Pengadaan Lahan Untuk Persemaian Uptd Spth		

				Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (%) (Satuan : %)	100	100.00	100.00	Adanya Penyesuaian Anggaran (refocusing Anggaran Dan Pergeseran Anggaran) Akibat Pandemic Covid 19 Sehingga Pelaksanaan Kegiatan Menyesuaikan Dengan Anggaran Yang Tersedia	Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Kegiatan Secara Efektif Dan Efisien Dengan Lebih Memprioritaskan Kegiatan Kegiatan Dalam Rangka Mengatasi Permasalahan Terkait Dampak Pandemic Covid 19 Antara Lain Pemberdayaan Masyarakat Yang Bersifat Pemberdayaan Ekonomi, Penciptaan Lapangan Pekerjaan, Swakelola Dan Padat Karya.	
				Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100	100.00	100.00	Proses Pengandministrasian Dan Pelaporan Penatausahaan Keuangan Beberapa Kegiatan Masih Belum Tepat Waktu Yang Berpengaruh Terhadap Pelaksanaan Kegiatan	Proses Persiapan Pengadminditrasian Dan Pelaporan Yang Lebih Baik Lagi Serta Peningkatan Koordinasi Dengan Pelaksana Kegiatan Dengan Memperhatikan Dan Mengacu Pada Rencana Operasional Kegiatan Atau (rok) Yang Telah Dibuat	
				Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100	100.00	100.00	Terbatasnya Ketersediaan Anggaran Dalam Peningkatan Kapasitas Aparatur	Dukungan Anggaran Dan Perencanaan Pengembangan Kapasitas Aparatur Yang Lebih Baik	
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan : %)	100	100.00	100.00	Belum Optimalnya Inventarisasi Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Menunjang Kelancaran Tugas Dan Fungsi Admisiontrasi Perangkat Daerah (kebutuhan Gedung Kantor Untuk Uptd/cdlhk, Kendaraan Dinas Lapangan /operasional)	Melaksanakan Inventarisasi Ketersediaan Sapras Perkantoran Serta Mengusulkan/merencanakan Penyediaan Sapras Dan Penyiapan Anggaran Pada Tahun Berikutnya	
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan : %)	100	100	100.00	Belum Optimalnya Inventarisasi Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Menunjang Kelancaran Tugas Dan Fungsi Admisiontrasi Perangkat Daerah (kebutuhan Gedung Kantor)	Melaksanakan Inventarisasi Ketersediaan Sapras Perkantoran Serta Mengusulkan/merencanakan Penyediaan Sapras Dan Penyiapan Anggaran Pada Tahun Berikutnya	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
				Forum Rencana Kerja Perangkat Daerah Bidang LHK Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022n Anggaran 2022 (Satuan : Dokumen)	1	1.00	100.00	Pelaksanaan Forum dilaksanakan secara virtual, sehingga data usulan kegiatan oleh DLHK Kab/Kota tidak maksimal	Koordinasi dengan DLHK Kab/Kota se-Provinsi Banten	
				Tersusunnya Buku Rencana Kerja DLHK Provinsi Banten Tahun 2022 (Satuan : Dokumen)	1	1.00	100.00	Belum Optimalnya data-data pendukung Penyusunan Buku Rencana Kerja DLHK Provinsi Banten	Koordinasi dengan PPTK dan PPTSK DLHK Provinsi Banten	

				<i>Tersusunya Daftar Rincian Kegiatan dan Rencana Operasional Kegiatan DLHK Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 (Satuan : Dokumen)</i>	1	1.00	100.00	SHS Provinsi Banten sebagai acuan Penyusunan DRK baru dibagikan pada akhir tahun anggaran	Koordinasi dengan BPKAD Banten	
				<i>Tersusunya Dokumen Analisa Resiko Kegiatan DLHK Provinsi Banten (Satuan : Dokumen)</i>	1	1.00	100.00	Belum Optimalnya PPTK dalam menyusun Dokumen Analisa Resiko Kegiatan	Perlu dilaksanakan bimbingan secara langsung oleh Inspektorat Provinsi Banten dalam menyusun Dokumen Analisa Resiko Kegiatan	
				<i>Tersusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja DLHK Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 (Satuan : Dokumen)</i>	1	1.00	100.00	Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Awal Renja dilaksanakan secara virtual sehingga data usulan Kab/kota tidak maksimal	Koordinasi dengan DLHK Kab/Kota se-Provinsi Banten	
				<i>Tersusunya Rencana Kerja DLHK Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 (Satuan : Dokumen)</i>	1	1.00	100.00	Belum Optimalnya data-data pendukung penyusunan Rencana Kerja DLHK Provinsi Banten	Koordinasi dengan PPTK dan PPTSK DLHK Provinsi Banten	
				<i>Tersusunya Rencana Kerja Perubahan DLHK Provinsi Banten Tahun 2021 (Satuan : Dokumen)</i>	1	1.00	100.00	Belum Optimalnya data-data pendukung penyusunan Rencana Kerja Perubahan DLHK Provinsi Banten	Koordinasi dengan PPTK dan PPTSK DLHK Provinsi Banten	
				<i>Tersusunya Rencana Umum Pengadaan (RUP) DLHK Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 (Satuan : Dokumen)</i>	1	1.00	100.00	Belum optimalnya pemahaman pengenai proses penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP)	Optimalisasi Koordinasi dengan PPTK Kegiatan DLHK Provinsi Banten	
			<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>							
				<i>Tersusunya RKA DLHK Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 (Satuan : Dokumen)</i>	1	1.00	100.00	Proses Penyusunan mengalami keterlambatan mengikuti jadwal dari TAPD Provinsi Banten	Koordinasi dengan Tim TAPD Provinsi Banten	
			<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>							
				<i>Tersusunya RKA Perubahan DLHK Provinsi Banten Tahun 2021 (Satuan : Dokumen)</i>	1	1.00	100.00	Proses Penyusunan mengalami keterlambatan mengikuti jadwal dari TAPD Provinsi Banten	Koordinasi dengan Tim TAPD Provinsi Banten	
			<i>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i>							
				<i>Tersusunya DPA DLHK Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 (Satuan : Dokumen)</i>	1	1.00	100.00	Proses Penyusunan mengalami keterlambatan mengikuti jadwal dari TAPD Provinsi Banten	Koordinasi dengan Tim TAPD Provinsi Banten	
			<i>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD</i>							
				<i>Tersusunya DPA Perubahan (DPPA) DLHK Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 (Satuan : Dokumen)</i>	1	1.00	100.00	Proses Penyusunan mengalami keterlambatan mengikuti jadwal dari TAPD Provinsi Banten	Koordinasi dengan Tim TAPD Provinsi Banten	

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
				<i>Terlaksananya Evaluasi SAKIP Kegiatan DLHK Provinsi Banten (Triwulan) (Satuan : Dokumen)</i>	1	1.00	100.00	Pelaksanaan Evaluasi SAKIP Triwulan seringkali mengalami keterlambatan, karena masing-masing kegiatan tidak menyelesaikan sesuai waktu yang ditetapkan	Koordinasi dengan PPTK dan PPTSK lebih intensif
				<i>Terlaksananya Pengelolaan PPID Pembantu DLHK Provinsi Banten (Satuan : Dokumen)</i>	1	1.00	100.00	Implementasi UU KIP belum dapat dipahami oleh seluruh unsur DLHK Provinsi Banten	Sosialisasi UU KIP dan PerKI Nomor 01 Tahun 2021
				<i>Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Indikator Pembangunan Bidang LHK Provinsi Banten Semester 1 dan 2 Tahun 2020 (Satuan : Dokumen)</i>	1	1.00	100.00	Belum Optimalnya Data-data Pendukung Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Indikator Pembangunan Bidang LHK Provinsi Banten Semester 1 dan 2 Tahun 2021	Koordinasi dengan masing-masing seksi teknis untuk ketersediaan dokumen pendukung
				<i>Tersusunya Data Statistik Sektoral Bidang LHK (Satuan : Dokumen)</i>	1	1.00	100.00	Belum Optimalnya Data Pendukung Penyusunan Data Statistik Sektoral Bidang LHK Provinsi Banten Tahun 2021	Koordinasi dengan masing-masing seksi teknis untuk ketersediaan dokumen pendukung
				<i>Tersusunya Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik (Laporan Bulanan), Laporan Realisasi Barang dan Jasa DLHK Provinsi Banten (Satuan : Dokumen)</i>	1	1.00	100.00	Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik Masing-masing Kegiatan belum menyeleraskan dengan LRA Keuangan pada Aplikasi SIMRAL	Koordinasi dengan Subbag Keuangan DLHK Provinsi Banten
			<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>						
				<i>Terlaksananya Pengelolaan Website DLHK Provinsi Banten (Satuan : Dokumen)</i>	1	1.00	100.00	Belum optimalnya pengetahuan dan pemahaman mengenai pengelolaan website	Koordinasi dengan Diskominfo Provinsi Banten
				<i>Tersusunnya Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja DLHK Provinsi Banten Tahun 2021 (Satuan : Dokumen)</i>	1	1.00	100.00	Tidak ada kendala	Tidak ada
				<i>Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) DLHK Provinsi Banten (Satuan : Dokumen)</i>	1	1.00	100.00	Belum Optimalnya data-data pendukung penyusunan LPPD DLHK Provinsi Banten	Koordinasi dengan PPTK dan PPTSK DLHK Provinsi Banten
				<i>Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DLHK Provinsi Banten (Satuan : Dokumen)</i>	1	1.00	100.00	Belum Optimalnya Data-data pendukung Penyusunan LKPJ DLHK Provinsi Banten Tahun 2021	Koordinasi dengan PPTK dan PPTSK Lingkup DLHK Provinsi Banten
				<i>Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DLHK Provinsi Banten (Satuan : Dokumen)</i>	1	1.00	100.00	Belum Optimalnya Data-data pendukung Penyusunan LKIP DLHK Provinsi Banten Tahun 2021	Koordinasi dengan PPTK dan PPTSK Lingkup DLHK Provinsi Banten

			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
				Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan : Bulan)	14	14.00	100.00	dikarenakan keterlambatan SK Kenaikan Pangkat Dan KGB	Koordinasi dengan pihak kepegawaian	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Satuan : Dokumen)	1	1.00	100.00	Dikarenakan Keterlambatan SK PA dan SK Penatausahaan Keuangan Dan SK Pengurus Barang	Akan dikordinasikan lagi dengan pihak kepegawaian	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Satuan : Dokumen)	1	1.00	100.00	tidak ada	Kegiatan Pelaksanaan 100%	
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD							
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Satuan : Dokumen)	1	1.00	100.00	Permasalahan yg dihadapi semakin baik	akan koordinasikan lagi dengan upt dan cdlhk dengan	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
				Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Satuan : Dokumen)	1	1.00	100.00	tidak ada	Kegiatan Pelaksanaan 100%	
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan							
				Telaksananya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Satuan : Dokumen)	1	1.00	100.00	tidak ada	Kegiatan Pelaksanaan 100%	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD							
				Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Satuan : Dokumen)	1	1.00	100.00	tidak ada	Kegiatan Pelaksanaan 100%	
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran							

				<i>Tersusunnya Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Satuan : Dokumen)</i>	1	1.00	100.00	tidak ada	Kegiatan Pelaksanaan 100%	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
			<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>							
				<i>Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Satuan : Bulan)</i>	12	12.00	100.00	proses administrasi, rincian belanja belum sesuai dengan yang dibutuhkan kegiatan	percepatan pengadministrasian, dialokasikan pada APBD TA.2022	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
			<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>							
				<i>Tersedianya pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya (Satuan : Stel)</i>	246	246.00	100.00	ketidaksesuaian Bahan dan Ukuran saat mendata dan sesudah Jadi	melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait (Penjahit) agar tidak terjadi kesalahan saat pelaksanaan kegiatan	
			<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>							
				<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Satuan : Dokumen)</i>	1	1.00	100.00	Terlambatnya pengajuan ke bagian keuangan dalam proses pencairan	Koordinasi dengan pengelola Administrasi keuangan	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah							
			<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>							
				<i>Tersedianya komponen instalasi listrik/Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Satuan : Bulan)</i>	12	12.00	100.00	proses administrasi menunggu revolving GU	percepatan pengadministrasian	
				<i>Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Alat Listrik Pada CDLHK LT (Satuan : Bulan)</i>	12	12.00	100.00	tidak ada permasalahan yang terjadi	-	
				<i>tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Pada UPTD Lab. Lingkungan (Satuan : Bulan)</i>	12	12.00	100.00	- Alokasi penyediaan anggaran yg tidak konsisten dan susah u/ dikembangkan - u/ meningkatkan progress kegiatan seiring peningkatan fungsi laboratorium lingkungan sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi DLHK untuk Pengawasan Lingkungan Hidup Prov Banten	Mesti intensif diperhatikan karena merupakan potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah	
				<i>Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Satuan : Bulan)</i>	1	1.00	100.00	Tidak ada	-	-

				<i>Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Pada UPTD Pengelolaan TahuraTahura (Satuan : Bulan)</i>	2	2.00	100.00	Tidak ada permasalahan yang terjadi	-	-
			<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>							
				<i>tersedianya Alat Tulis Kantor Pada CDLHK PSC (Satuan : Bulan)</i>	12	12.00	100.00	Pengurangan anggaran karena recofusing	Koordinasi dengan PEP dalam penyesuaian Target	
				<i>Tersedianya peralatan perlengkapan kantor (Satuan : Bulan)</i>	12	12.00	100.00	proses administrasi menuggu revolving GU	percepatan pengadministrasian	
				<i>Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Alat Tulis Kantor (Satuan : Bulan)</i>	12	12.00	100.00	tidak terpenuhi sarana dan prasarana untuk kegiatan rutin kantor karena kurangnya anggaran belanja	memaksimalkan anggaran belanja yang ada	
				<i>tersedianya alat tulis kantor UPTD Lab. Lingungan (Satuan : Bulan)</i>	12	12.00	100.00	- Alokasi penyediaan anggaran yg tidak konsisten dan susah u/ dikembangkan - u/ meningkatkan progress kegiatan seiring peningkatan fungsi laboratorium lingkungan sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi DLHK untuk Pengawasan Lingkungan Hidup Prov Banten	Mesti intensif diperhatikan karena merupakan potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah	
				<i>Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Satuan : Bulan)</i>	5	10.00	200.00	Tidak ada	-	-
				<i>Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kntor UPTD Tahura (Satuan : Bulan)</i>	4	4.00	100.00	kurang terpenuhinya penyediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan rutin karena kurangnya anggaran belanja	memaksimalkan anggaran yang ada	-
			<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>							
				<i>Tersedianya Bahan Logistik Kantor (Satuan : Bulan)</i>	12	12.00	100.00	proses administrasi menuggu revolving GU	percepatan pengadministrasian	
				<i>Terlaksananya Penyediaan makanan dan minuman (Satuan : Bulan)</i>	12	12.00	100.00	anggaran penyediaan BBM untuk kendaraan esselon dan operasional di hapus karena sudah termasuk dalam kegiatan Pemeliharaan	dilakukan pemindahan anggaran untuk memenuhi sewa gedung yang kurang anggaran	
				<i>Tersedianya Bahan Logistik Kantor CDLHK PSC (Satuan : Bulan)</i>	12	12.00	100.00	Tidak ada permasalahan	Koordinasi dengan PEP dan Keuangan	

				<i>Tersedianya Bahan Logistik Kantr UPTD Lab. Lingkungan (Satuan : Bulan)</i>	12	12.00	100.00	- Alokasi penyediaan anggaran yg tidak konsisten dan susah u/ dikembangkan - u/ meningkatkan progress kegiatan seiring peningkatan fungsi laboratorium lingkungan sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi DLHK untuk Pengawasan Lingkungan Hidup Prov Banten	Mesti intensif diperhatikan karena merupakan potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah	
				<i>Tersedianya makanan dan minuman UPTD SPTH (Satuan : Bulan)</i>	11	0.00	0.00			
				<i>Tersedianya pengisian tabung gas UPTD SPTH (Satuan : Bulan)</i>	11	0.00	0.00			
				<i>Tersedianya makanan dan minuman (Satuan : Bulan)</i>	12	24.00	200.00	Tidak ada	-	-
				<i>Tersedianya Bahan Logistik Kntr UPTD Tahura (Satuan : Bulan)</i>	12	12.00	100.00	Tidak ada permasalahan yang terjadi	-	-
			<i>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>							
				<i>Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (Satuan : Bulan)</i>	12	12.00	100.00	proses administrasi menuggu revolving GU	percepatan pengadministrasian	
				<i>tersedianya barang cetakan dan penggandaan (Satuan : Bulan)</i>	12	12.00	100.00	kebutuhan cetak amplop CDLHK tidak terpenuhi	memaksimalkan cetak dengan anggaran yang ada	
				<i>Tersedianya barang cetakan dan penggandaan CDLHK PSC (Satuan : Bulan)</i>	12	12.00	100.00	Recofusing Anggaran	Koordinasi dengan PEP dalam penyesuaian Target	
				<i>tersedianya Barang Cetakan dan Penggndaan UPTD Lab. Lingkungan (Satuan : Bulan)</i>	12	12.00	100.00	- Alokasi penyediaan anggaran yg tidak konsisten dan susah u/ dikembangkan - u/ meningkatkan progress kegiatan seiring peningkatan fungsi laboratorium lingkungan sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi DLHK untuk Pengawasan Lingkungan Hidup Prov Banten	Mesti intensif diperhatikan karena merupakan potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah	
				<i>Tersedianya barang cetakan dan penggandan UPTD SPTH (Satuan : Bulan)</i>	12	24.00	200.00	Tidak ada	-	-
				<i>trsedianya barang cetakan dan penggandaan UPTD Tahura (Satuan : Bulan)</i>	12	12.00	100.00	Kebutuhan cetak spanduk tidak terpenuhi	memaksimalkan biaya dengan anggaran yang ada	-
			<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>							
				<i>Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Satuan : Bulan)</i>	12	12.00	100.00	proses administrasi menuggu revolving GU	percepatan pengadministrasian	

				<i>Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan CDLHK LT (Satuan : Bulan)</i>	12	12.00	100.00	tidak ada permasalahan yang terjadi	-	
				<i>Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan CDLHK PSC (Satuan : Bulan)</i>	12	12.00	100.00	Pagu dalam DPA tidak mencukupi	Koordinasi dengan PEP dalam penyesuaian Target	
				<i>Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan UPTD SPTH (Satuan : Bulan)</i>	12	24.00	200.00	Tidak ada	-	-
				<i>Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan UPTD Tahura (Satuan : Bulan)</i>	12	12.00	100.00	Tidak ada permasalahan yang terjadi	-	-
			<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>							
				<i>Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan : Bulan)</i>	12	12.00	100.00	proses administrasi menuggu revolving GU	percepatan pengadministrasian	
				<i>Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah luar (Satuan : Bulan)</i>	12	12.00	100.00	Kurangnya pagu anggaran untuk mengkover kegiatan perjalanan ke luar daerah seperti ke jawa barat dan lampung	memaksimalkan anggaran perjaldin yang ada	
				<i>Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah luar CDLHK PSC (Satuan : Bulan)</i>	12	12.00	100.00	Recofusing Anggaran	Penurunan/penyesuaian target pelaksanaan perjalanan dinas	
				<i>Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah UPTD Lab. Lingkungan (Satuan : Bulan)</i>	12	12.00	100.00	- Alokasi penyediaan anggaran yg tidak konsisten dan susah u/ dikembangkan - u/ meningkatkan progress kegiatan seiring peningkatan fungsi laboratorium lingkungan sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi DLHK untuk Pengawasan Lingkungan Hidup Prov Banten	Mesti intensif diperhatikan karena merupakan potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah	
				<i>Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah UPTD SPTH (Satuan : Bulan)</i>	7	14.00	200.00	Tidak ada	-	-
				<i>Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UPTD Tahura (Satuan : Bulan)</i>	12	12.00	100.00	Kurangnya anggaran untuk kegiatan perjalanan biasa dikarenakan banyak kegiatan harus koordinasi ke pusat	memaksimalkan biaya anggaran yang ada	-
			<i>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>							
				<i>Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan : Dokumen)</i>	1	1.00	100.00	proses administrasi menuggu revolving GU	percepatan pengadministrasian	

			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
			<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>						
			<i>Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Satuan : Unit)</i>	22	22.00	100.00	proses administrasi menuggu revolving GU	percepatan pengadministrasian	
			<i>Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor pada CDLHK LT (Satuan : Unit)</i>	0	0.00	0.00	Pagu anggaran kurang	dilakukan refocusing anggaran untuk COVID-19	
			<i>Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada CDLHK PSC (Satuan : Bulan)</i>	12	12.00	100.00	Recofusing Anggaran	Koordinasi dengan PEP dalam penyesuaian Target	
			<i>Trlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya UPTD Lab. Lingkungan (Satuan : Bulan)</i>	12	12.00	100.00	- Alokasi penyediaan anggaran yg tidak konsisten dan susah u/ dikembangkan - u/ meningkatkan progress kegiatan seiring peningkatan fungsi laboratorium lingkungan sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi DLHK untuk Pengawasan Lingkungan Hidup Prov Banten	Mesti intensif diperhatikan karena merupakan potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah	
			<i>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah UPTD SPTH (Satuan : Bulan)</i>	4	4.00	100.00	1 unit Mesin Absensi tidak dapat direalisasikan, dikarenakan anggaran di SIPD tidak mencukupi untuk proses pengadaan secara E-Catalog	Koordinasi dengan subag PEP&Keuangan DLHK	Dialokasikan anggaran pada tahun berikutnya dengan jumlah anggaran yang sesuai
			<i>Pengadaan Aset Tetap Lainnya</i>						
			<i>Terlaksananya Pengadaan Aset Tetap LainnyaTersedianya Pengadaan Aset Tetap Lainnya (Satuan : Unit)</i>	7	7.00	100.00	proses administrasi menuggu revolving GU	percepatan pengadministrasian	
			<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>						
			<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya UPTD TAHURA (Satuan : Paket)</i>	3	3.00	100.00	Sarana dan Prasarana perlengkapan kantor belum memadai karena kurangnya dukungan anggaran	memaksimalkan biaya anggaran yang ada	-
			<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>						
			<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>						
			<i>Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik (Satuan : Bulan)</i>	12	12.00	100.00	Invoice/tagihan listrik penyampaiannya tidak tepat waktu	Berkoodinasi dengan pihak terkait(PLN)	
			<i>tersedianya fasilitas jasa komunikasi air dan listrik (Satuan : Bulan)</i>	12	12.00	100.00	kurang nya anggaran untuk memenuhi 4 token listrik yang ada	memaksimalkan anggaran yang ada sesuai dengan kebutuhan masing" pada Token Listrik	

				<i>Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik CDLHK PSC (Satuan : Bulan)</i>	12	12.00	100.00	Kekurangan tenaga administrasi	Koordinasi dan konsultasi dengan bagian kepegawaian terkait kebutuhan pegawai	
				<i>Tersedianya Fasilitas Jasa Komunikasi, Air dan Listrik UPTD SPTH (Satuan : Bulan)</i>	12	12.00	100.00	Relatif tidak ada masalah	-	-
				<i>Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD Tahura (Satuan : Bulan)</i>	12	12.00	100.00	Kurangnya anggaran untuk memenuhi belanja token listrik karena penggunaan listrik kantor sangat besar	memaksimalkan biaya anggaran yang ada	-
			<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>							
				<i>Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor (Satuan : Bulan)</i>	12	12.00	100.00	Asuransi kecelakaan dan kematian kerja belum terserap	memperbaiki nomenkatur SIPD	
				<i>Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor (Satuan : Bulan)</i>	12	12.00	100.00	kenaikan harga sewa gedung melebihi anggaran yang telah tersedia pada DPA	melakukan pemindahan anggaran dari kegiatan lain untuk memenuhi kebutuhan sewa gedung.	
				<i>Terlaksananya Pelayanan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Lab. Lingkungan (Satuan : Bulan)</i>	12	12.00	100.00	- Alokasi penyediaan anggaran yg tidak konsisten dan susah u/ dikembangkan - u/ meningkatkan progress kegiatan seiring peningkatan fungsi laboratorium lingkungan sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi DLHK untuk Pengawasan Lingkungan Hidup Prov Banten	Mesti intensif diperhatikan karena merupakan potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah	
				<i>Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor (Satuan : Bulan)</i>	12	12.00	100.00	Relatif tidak ada masalah	-	-
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
			<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>							
				<i>Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Satuan : Bulan)</i>	12	12.00	100.00	kurangnya alokasi anggaran pemeliharaan kendaraan perorangan atau jabatan	penambahan anggaran TA.2022 untuk mendukung kelancaran tugs dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov.Banten	
			<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>							
				<i>Terlaksananya pemeliharaan rutin /berkala kendaraaan dinas/operasional (Satuan : Bulan)</i>	12	12.00	100.00	beberapa unit kendaraan kantor tidak dilakukan Pemeliharaan Rutin karena anggaran yang tidak mencukupi	memaksimalkan anggaran pemeliharaan yang ada	

				<i>Terlaksananya pemeliharaan rutin /berkala kendaraaan dinas/operasional CDLHK PSC (Satuan : Bulan)</i>	12	12.00	100.00	Recofusing Anggaran	Target output menyesuaikan dengan persediaan anggaran	
				<i>Terpeliharanya Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional UPTD Lab. Lingkungan (Satuan : Bulan)</i>	12	12.00	100.00	- Alokasi penyediaan anggaran yg tidak konsisten dan susah u/ dikembangkan - u/ meningkatkan progress kegiatan seiring peningkatan fungsi laboratorium lingkungan sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi DLHK untuk Pengawasan Lingkungan Hidup Prov Banten	Mesti intensif diperhatikan karena merupakan potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah	
				<i>tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional UPTD Lab. Lingkungan (Satuan : Bulan)</i>	12	12.00	100.00	- Alokasi penyediaan anggaran yg tidak konsisten dan susah u/ dikembangkan - u/ meningkatkan progress kegiatan seiring peningkatan fungsi laboratorium lingkungan sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi DLHK untuk Pengawasan Lingkungan Hidup Prov Banten	Mesti intensif diperhatikan karena merupakan potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah	
				<i>Terlaksananya Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraaan Dinas/Operasional UPTD SPTH (Satuan : Bulan)</i>	8	8.00	100.00	Tidak terakomodirnya BBM kendaraan operasional dinas	Koordinasi dengan subag PEP DLHK	
				<i>Trlaksananya pemeliharaan rutin /berkala kendaraaan dinas/operasional UPTD Tahura (Satuan : Bulan)</i>	10	10.00	100.00	Anggaran kendaraan roda 2 kurang mencukupi	memaksimalkan biaya anggaran yang ada	-
				<i>Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Satuan : Bulan)</i>	12	12.00	100.00	kurangnya alokasi anggaran pemeliharaan kendaraan oprasional atau lapangan	penambahan anggaran TA.2022 untuk mendukung kelancaran tugs dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov.Banten	
				<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>						
				<i>Terpeliharanya/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Satuan : Bulan)</i>	12	12.00	100.00	Kurangnya alokasi anggaran pemeliharaan gedung kantor	penambahan anggaran TA.2022 untuk mendukung kelancaran tugs dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov.Banten	
				<i>Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (Satuan : Bulan)</i>	12	12.00	100.00	sarpras kantor tidak dilakukan Pemeliharaan Rutin karena anggaran yang tidak mencukupi	memaksimalkan anggaran pemeliharaan yang ada	
				<i>Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya CDLHK PSC (Satuan : Bulan)</i>	12	12.00	100.00	Recofusing Anggaran	Target output menyesuaikan dengan persediaan anggaran	

				<i>Terpeliharanya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor UPTD Lab. Lingkungan (Satuan : Bulan)</i>	12	12.00	100.00	- Alokasi penyediaan anggaran yg tidak konsisten dan susah u/ dikembangkan - u/ meningkatkan progress kegiatan seiring peningkatan fungsi laboratorium lingkungan sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi DLHK untuk Pengawasan Lingkungan Hidup Prov Banten	Mesti intensif diperhatikan karena merupakan potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah	
				<i>Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UPTD Tahura (Satuan : Bulan)</i>	7	7.00	100.00	Tidak ada permasalahan yang terjadi	-	-
				<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>						
				<i>Terpeliharanya /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Satuan : Bulan)</i>	12	12.00	100.00	Kurangnya alokasi anggaran pemeliharaan pendukung gedung kantor	penambahan anggaran TA.2022 untuk mendukung kelancaran tugs dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov.Banten	
				<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>						
				<i>Terlaksananya Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor UPTD SPTH (Satuan : Bulan)</i>	12	12.00	100.00	Tidak optimalnya pemeliharaan gedung kantor, Laboratorium dan Persemaian permanen	Koordinasi dengan subag PEP DLHK	
				<i>Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor UPTD SPTH (Satuan : Bulan)</i>	12	12.00	100.00	Tidak terakomodirnya pemeliharaan jaringan air, listrik, dan pemeliharaan alat-alat pertanian	Koordinasi dengan subag PEP DLHK	
				Program Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup						
				<i>Persentase peningkatan pelayanan Laboratorium Lingkungan (Satuan : %)</i>	17.6	17.60	100.00	- Terhambatnya Peningkatan Pelayanan Laboratorium Lingkungan Dikarenakan Parameter Lingkup Akreditasi Masih Terbatas Siingga Belum Memenuhi Kebutuhan Pelanggan Khususnya Parameter Kualitas Udara Ambien Dan Parameter Kualitas Udara Tidak Bergerak (cerobong). - Belum Dilakukannya Pelatihan Samling Kualitas Udara Tidak Bergerak (cerobong) Bagi Petugas Pengambil Sampel Yang Diselenggaran Oleh Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Dlhk Provinsi Banten.	- Pada Bulan Nopember 2021 Uptd Laboratorium Lingkungan Telah Mendaftar Reakreditasi Dan Penambahan Ruang Lingkup Parameter Kualitas Udara Ambien (pm 10; Pm 2,5: Tsp Dan Tingkat Kebisingan Lingkungan) Dan Akan Dilaksanakan Asesmen Oleh Komite Akreditasi Nasional (kan) Pada Awal Tahun 2022. - Pada Triwulan 2 Tahun 2022 Akan Dilaksanakan Pelatihan Samling Kualitas Udara Tidak Bergerak (cerobong) Bagi Petugas Pengambil Sampel Yang Diselenggaran Oleh Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Dlhk Provinsi Banten.	

				Persentase peningkatan pelayanan Laboratorium Lingkungan (Satuan : %)	17.6	17.6	100.00	- Terbatasnya Parameter Lingkup Akreditasi (parameter Udara Ambien Dan Parameter Udara Tidak Bergerak/cerobong) - Belum Dilakukannya Pelatihan Samling Kualitas Udara Tidak Bergerak (cerobong) Bagi Petugas Pengambil Sampel. - Keterbatasan Sdm Dalam Peningkatan Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Di Dlhk Masih Terbatas	" - Penambahan Ruang Lingkup Parameter Kualitas Udara Ambien Pada Tahun 2022 - Mendorong Pelaksanaan Peningkatan Sdm Dalam Peningkatan Pengendalian Pencemaran Melalui Kegiatan Pen Ingkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup						
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut						
				Terlaksananya pemantauan kualitas air laut (Satuan : Dokumen)	1	1.00	100.00	Penghitungan Hasil IKAL untuk nilai IKLH Provinsi Banten harus bersamaan input datanya secara nasional bersama kabupaten/kota dalam sistem KLHK, permasalahan timbul ketika kita sudah input data tapi kabupaten/kota belum input maka belum dapat diverifikasi	Penginputan IKAL Berkoordinasi dengan kabupaten/kota dan pusat	-
				Terlaksananya pemantauan kualitas udara ambien sesuai baku mutu udara ambien (Satuan : Dokumen)	1	1.00	100.00	Penghitungan Hasil IKU untuk nilai IKLH Provinsi Banten harus bersamaan input datanya secara nasional bersama kabupaten/kota dalam sistem KLHK, permasalahan timbul ketika kita sudah input data tapi kabupaten/kota belum input maka belum dapat diverifikasi	Penginputan IKU Berkoordinasi dengan kabupaten/kota dan pusat	-
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim						
				Terlaksanannya Pembinaan Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim menuju tingkat Nasional sesuai pedoman (Satuan : Dokumen)	1	1.00	100.00	Kegiatan program kampung iklim tidak menjadi prioritas utama untuk wajib dilaksanakan di Kab/Kota	Koordinasi dengan DLH kab/kota agar dapat mengusulkan wilayah yang akan dilakukan pembinaan proklam	

				<i>Tersusunnya Laporan pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Emisi GRK Sektor Limbah sesuai pedoman (Satuan : Dokumen)</i>	1	1.00	100.00	Minimnya data GRK di Kabupaten/Kota	Koordinasi dengan DLH Kabupaten/Kota	
			<i>Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi</i>							
				<i>Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi Eksternal (Satuan : Sampel)</i>	35	35.00	100.00	Masih masa pandemi dan diberlakukannya PPKM dari awal Juni s/d Desember, Sehingga tidak bisa melaksanakan sampling retribusi sesuai permintaan, dan adanya persyaratan wajib antigen dari perusahaan bagi petugas sampling dimana anggaran tidak tersedia	Menganggarkan biaya tes antigen untuk petugas sampling	
				<i>Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi Sampel Internal (Satuan : Sampel)</i>	222	222.00	100.00	adanya recfocusing anggaran perjalanan dinas sebanyak 2 kali untuk pengambilan sampel Internal	Anggaran yang sudah tersedia pada tahun anggaran 2022 agar diproporsionalkan sesuai dengan target rencana sampling	
				<i>Terlaksananya Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi (Satuan : Dokumen)</i>	1	0.00	0.00			
			<i>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</i>							
			<i>Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</i>							
				<i>terlaksananya upaya isolasi pencemaran dampak kerusakan lingkungan hidup (Satuan : Dokumen)</i>	1	1.00	100.00	Upaya pengisolasian pencemaran lingkungan dilaksanakan sesuai dengan kasus pencemaran yang terjadi	Berkoordinasi dengan kab/kota dan Pusat	-
			<i>Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</i>							
				<i>Tersusunnya dokumen perencanaan pengendalian pencemaran lingkungan sesuai dengan tatalaksana pengendalian pencemaran air (Satuan : Dokumen)</i>	1	1.00	100.00	Upaya penghentian pencemaran lingkungan dilaksanakan sesuai dengan kasus pencemaran yang terjadi	Berkoordinasi dengan kab/kota dan Pusat	-
			<i>Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat</i>							

				<i>Meningkatnya Kompetensi Laboratorium DLHK Melalui Uji Profesiensi (Satuan : Parameter)</i>	25	25.00	100.00	Dalam pelaksanaan sub kegiatan pemberian informasi peringatan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat selama tahun 2021 belum maksimal pada pembacaan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) karena alat AQMS pada lima lokasi tersebut	Untuk mendapatkan hasil pembacaan alat AQMS berupa data Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan maka pada tahun 2022 telah dianggarkan pada kegiatan pemeliharaan peralatan laboratorium pada UPTD Laboratorium L		
				<i>Meningkatnya Kompetensi Personil Laboratorium Melalui Pelatihan Parameter Air Laut (Satuan : Parameter)</i>	5	5.00	100.00	Dalam pelaksanaan sub kegiatan pemberian informasi peringatan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat selama tahun 2021 belum maksimal pada pembacaan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) karena alat AQMS pada lima lokasi tersebut	Untuk mendapatkan hasil pembacaan alat AQMS berupa data Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan maka pada tahun 2022 telah dianggarkan pada kegiatan pemeliharaan peralatan laboratorium pada UPTD Laboratorium L		
				<i>Terlaksananya Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat (Satuan : Dokumen)</i>	1	1.00	100.00	Dalam pelaksanaan sub kegiatan pemberian informasi peringatan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat selama tahun 2021 belum maksimal pada pembacaan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) karena alat AQMS pada lima lokasi tersebut	Untuk mendapatkan hasil pembacaan alat AQMS berupa data Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan maka pada tahun 2022 telah dianggarkan pada kegiatan pemeliharaan peralatan laboratorium pada UPTD Laboratorium L		
				<i>Terlaksananya Permohonan Reakreditasi Laboratorium DLHK (Satuan : Parameter)</i>	1	1.00	100.00	Dalam pelaksanaan sub kegiatan pemberian informasi peringatan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat selama tahun 2021 belum maksimal pada pembacaan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) karena alat AQMS pada lima lokasi tersebut	Untuk mendapatkan hasil pembacaan alat AQMS berupa data Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan maka pada tahun 2022 telah dianggarkan pada kegiatan pemeliharaan peralatan laboratorium pada UPTD Laboratorium L		
			Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup								
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran								
				<i>Terlaksananya Evaluasi Kinerja Industri Pengumpul, Pengolah, Pemanfaatan LimbahB3 (Pembinaan dan Pemantauan Pengelola Limbah B3) (Satuan : Dokumen)</i>	1	1.00	100.00	adanya pandemi covid sehingga tidak memungkinkan djalannya kegiatan di awal tahun	di realisasikan di Bualn berikutnya		

			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar							
				Terlaksananya Pembinaan pengendalian pencemaran dan perusakan terhadap pelaku usaha kegiatan sesuai tata laksana pengendalian pencemaran (Satuan : Dokumen)	1	1.00	100.00	Kasus pemulihan pencemaran harus disesuaikan dengan asus pencemaran lingkungan yang terjadi	Berkoordinasi dengan kab/kota dan Pusat	-
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (kehati)							
				Indeks Kualitas Udara (Satuan : Nilai)	68,8	74.14	109.03	Masih Tingginya Volume Kendaraan Dan Masih Banyak Nyia Industri Yang Menggunakan Batubara,	Optimalisasi Dan Kerjasama Dengan Stkeholder Terkait Dalam Pengaturan Jumlah Kendaraan Serta Mendorong Industri Ramah Lingkungan	
			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi							
			Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati							
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan danPembentukan Taman Kehati Banten (Satuan : Dokumen)	1	1.00	100.00	Terkendala permohonan data statistik Perencanaan dan Pembentukan Taman Kehati Banten	Koordinasi dengan pihak terkait untuk mempermudah pengolahan data	
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati							
				terlaksananya pengembangan kelembagaan dalampengelolaan Kehati (Satuan : Dokumen)	1	1.00	100.00	Terkendala permohonan data statistik pengembangan kelembagaan dalampengelolaan Kehati	Koordinasi dengan pihak terkait untuk mempermudah pengolahan data	
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (pplh)							
				Persentase kettaatan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup (Satuan : %)	98	92.50	94.39	Terjadinya Perubahan Peraturan Terkait Pengelolongan Lingkungan Hidup (kewenagan Ijin /persetujuan Teknis) Dan Tahun 2021 Merupakan Periode Penyesuaian Aturan Sehingga Industri Masih Banyak Yang Belum Menyesuaikan Terhadap Peraturan Terbaru (uu No 32 Th 2009 Ke Pp No 22 Tahun 2021) - Terbatasnya Pengawas Lingkungan Hidup	Melaksanakan Sosialisasi Terkait Perubahan Pertauran/ketentuan Perundangan Terbaru Dan Implementasinya - Penambahan Sdm Pengawas Lingkungan Hidup	

			Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi							
			<i>Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH</i>							
			<i>Terlaksananya Pembinaan tata laksana penilaian dokumen lingkungan dan penerbitan izin lingkungan sesuai kompetensi (Satuan : Dokumen)</i>	9	9.00	100.00	dengan adanya Recofusing 1 dan Recofusing 2 maka ada kegiatan yang terlambat dalam penyelesaiannya	Koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar pelaksanaan kegiatan dapat selesai tepat waktunya		
			<i>Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup</i>							
			<i>Terlaksananya pengembangan kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup yang kompeten (Satuan : Dokumen)</i>	1	1.00	100.00	Belum ada PPLH yang dilantik menjadi fungsional pada tingkat provinsi	Berkoordinasi dengan BKD dan Biro Organisasi, analisa jabatan dan kebutuhan jumlah fungsional PPLH sudah diserahkan ke BKD		
			<i>Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi</i>							
			<i>Terlaksananya Pemantauan implementasi izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Provinsi Banten (Satuan : Dokumen)</i>	1	1.00	100.00	Beberapa perusahaan tidak dapat dilakukan pengawasan di lokasi kegiatan dikarenakan pembatasan kunjungan saat pandemi	Pengawasan dilakukan di kantor DLHK Provinsi Banten		
			<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH</i>							
			<i>Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi sesuai dengan SOP (Satuan : Dokumen)</i>	1	1.00	100.00	Adanya perubahan kewenangan dan perubahan mekanisme pemberian sanksi administrasi dikarenakan terbitnya UU no. 11 tahun 2020 dan turunannya	Berkoordinasi dengan KLHK dan melakukan sosialisasi ke DLH di Kab/Kota		
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat							
			<i>Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Satuan : Kelompok)</i>	76	99.00	130.26	Adanya Perubahan Kewenangan, Perubahan Mekanisme Perizinan Dan Perubahan Tata Laksana Penyusunan, Pemeriksaan/penilaian Terkait Penghargaan Dan Penilaian Pengelolaan Lingkungan Hidup	Melaksanakan Sosialisasi Terkait Perubahan Pertauran/ketentuan - Koordinasi Dengan Stakeholder Terkait		

			Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi							
			<i>Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</i>							
			<i>Terlaksananya Pembinaan dan Penilaian kepada lembaga/masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Satuan : Lembaga)</i>	35	35.00	100.00	1. Jadwal Penilaian terhalang oleh tidak sejalan dengan Kalender Pendidikan 2. Kab. Serang tidak mengikuti Adipura karena Pusat Pemerintahan Baru terbangun 3. Pendistribusian Bibit Untuk pemberdayaan MHA terkendala medan yang berat di Menuju Desa Cibarani	1. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/kota, Provinsi dan pihak Sekolah 2. Koordinasi sampai Pusat Pemerintahan kota Terbangun seluruhnya 3. Dilakukan Dropping secara bertahap dan koordinasi dengan pihak Desa dan Kasepuhan		
			Program Pengelolaan Persampahan							
			Indeks Kualitas Air (Satuan : Nilai)	53	54.47	102.77	Keterbatasan Sarana Prasarana Dan Sdm Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Limbah B3 - Dan Kurangnya Kesadaran Masyarakat	Peningkatan Prasarana Dan Sarana Serta Sdm Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Limbah B3 - Upaya Peningkatan Kesadaran masyarakat		
			Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional							
			<i>Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional</i>							
			<i>Tersusunya dokumen penetapan kebijakan dan strategis provinsi dalam pengelolaan sampah (Satuan : Dokumen)</i>	1	1.00	100.00	adanya pandemi covid sehingga tidak memungkinkan djalankan kegiatan di awal tahun	di realisasikan di akhir tahun		
			<i>Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional</i>							
			<i>Tersusunya MOU kerjasama antar daerah dalam satu provinsi, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan sampah (Satuan : Dokumen)</i>	1	1.00	100.00	adanya Recofusing anggaran	di laksanakan sesuai anggaran recofusing		
2	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan									

			Program Pengelolaan Hutan						
			Luas Lahan kritis yang terehabilitasi wilayah Lebak dan Tangerang (Satuan : Ha)	2.500	2.594.64	103.60	Keterbatasan Anggaran Dan Sdm Yang Menangani Rehabilitasi Hutan Dan Lahan	Berkoordinasi Dengan Stakeholder Terkait Dalam Penanganan Rhl (bpdas Citarum Siliwangi, Perum Perhutani Tnghs Dan Swasta) Dan Optimalisasi Tenaga Penyuluh Kehutanan Swadaya	
			Luas Lahan kritis yang terehabilitasi wilayah Lebak dan Tangerang (Satuan : Ha)	2.500	0				
			Tersedianya benih unggul yang bersertifikat bagi masyarakat (Satuan : Batang)	180.000	181.889	101.05	Serangan Hama Dan Penyakit Dan Terbatasnya Sapras Persemaian Serta Sdm Perbenihan	Peningkatan Pengendalian Hama Dan Penyakit, Penambahan Anggaran, Sapras Dan Sdm Perbenihan	
			Peningkatan Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat (Satuan : %)	10	25,08	250.00	Minimnya Data Pelaku Usaha Pemnafaatan Hutan Dan Hasil Hutan	- Sosialisasi Kewijaban Pelaporan Pemnafaatan Hutan Dan Hasil Hutan Bagi Masyarakat Dan Pemberian Punishment And Reward Pelaku Usaha Hasil Hutan	
			Luas Lahan kritis yang terehabilitasi Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon (Satuan : Ha)	2.500	0				
			Luas Lahan kritis yang terehabilitasi Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon (Satuan : Ha)	2.500	2571	102.840,00	Keterbatasan Informasi /data Penanaman Yang Dilaksanakan Oleh Masyarakat Diluar Kegiatan - Optimalisasi Tenaga Penyuluh Kehutanan Swadaya (pksm)	Upaya Inventarisasi Pelaksanaan Penanaman Yang Dilaksanakan Oleh Masyarakat Diluar Kegiatan - Optimalisasi Tenaga Penyuluh Kehutanan Swadaya (pksm)	
			Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung						
			Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi						
			Tersusunnya data dan informasi sumberdaya hutanproduksi diwilayah Provinsi BantenTersusunnya data dan informasi sumberdaya hutan produksi diwilayah Provinsi Banten (Satuan : Dokumen)	1	1.00	100.00	1. Kegiatan terkendala karena adanya kebijakan PPKM sehingga beberapa kegiatan terhambat; 2. Kesulitan memperoleh data dan informasi	1. Lebih efektif dalam melakukan Koordinasi dengan stakeholder yang menangani bidang kehutanan dalam pengumpulan data dan informasi	
			Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung						
			Tersusunnya data dan informasi sumberdaya hutan Lindung diwilayah Provinsi Banten (Satuan : Dokumen)	3	2.00	66.67	1. Kegiatan terkendala karena adanya kebijakan PPKM sehingga beberapa kegiatan terhambat; 2. Kesulitan memperoleh data dan informasi	1. Lebih efektif dalam melakukan Koordinasi dengan stakeholder yang menangani bidang kehutanan dalam pengumpulan data dan informasi	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi						

				<i>Terlaksananya pengendalian izin usaha atau kerjasama pemanfaatan hutan untuk kegiatan non kehutanan dikawasan hutan produksi (Satuan : Dokumen)</i>	1	1.00	100.00	1. Pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya kebijakan PPKM;2. Belum tersosialisasinya Peraturan tebaru tentang Kehutanan terkait kewajiban bagi pemegang IPPHK	Melakukan sosialisasi peraturan terbaru tentang kehutanan terkait kewajiban yang harus dilaksanakan bagi pemegang IPPKH; 2. Melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan pinjam pakai kawasan hutan pemegang IPPHK	
				<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung</i>						
				<i>Terlaksananya pengendalian izin usaha atau kerjasama pemanfaatan hutan untuk kegiatan non kehutanan dikawasan hutan lindung (Satuan : Dokumen)</i>	1	1.00	100.00	1. Pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya kebijakan PPKM;2. Belum tersosialisasinya Peraturan tebaru tentang Kehutanan terkait kewajiban bagi pemegang IPPHK	1. Melakukan Sosialisasi terkait Peraturan Terbaru tentang Kehutanan terhadap pemegang IPPHK; 2. Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemegang IPPHK	
				<i>Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi</i>						
				<i>Terlaksananya penilaian rencana pengelolaan kawasan hutan produksi (Satuan : Dokumen)</i>	1	1.00	100.00	1. Belum tersedianya data terbaru dari stakeholder terkait; 2. Kesulitan melakukan penilaian langsung ke lapangan dikaenkan terkendala kebijakan PPKM dan cuaca	1. Melakukan Sosialisasi terkait Peraturan Terbaru tentang Kehutanan terhadap pemegang IPPHK; 2. Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemegang IPPHK	
				<i>Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung</i>						
				<i>Terlaksananya penilaian rencana pengelolaan kawasan hutan Lindung (Satuan : Dokumen)</i>	1	1.00	100.00	1. Belum tersedianya data terbaru dari stakeholder terkait; 2. Kesulitan melakukan penilaian langsung ke lapangan dikaenkan terkendala kebijakan PPKM dan cuaca	Melakukan koordinasi dengan KLHK terkait updating data terutama masalah batas kawasan hutan	
				<i>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)</i>						
				<i>Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati</i>						
				<i>Pengolahan Hasil Budidaya Bambu (Satuan : Komoditas)</i>	1	1.00	100.00	Pelaku usaha masih kesulitan dalam pemasaran kerajinan hasil olahan bambu	Melakukan temu usaha dalam rangka mempertemukan pelaku usaha pengusaha	
				<i>Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</i>						

				<i>Terlaksananya fasilitasi rekomendasi IUIPHBK sesuai dengan standar dan pedoman yang berlaku (Satuan : Dokumen)</i>	1	1.00	100.00	Pelaku usaha HHBK umumnya belum memiliki legalitas usaha	Mensosialisasikan dan memfasilitasi pelaku usaha HHBK untuk mendapatkan izin berusaha	
				<i>Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya</i>						
				<i>Pengembangan budidaya jamur tiram, lebah madu, Aren dan tanaman dibawah tegakan Pengembangan budidaya jamur tiram, lebah madu, Aren dan tanaman dibawah tegakan (Satuan : Komoditas)</i>	4	4.00	100.00	Dalam budidaya komoditas HHBK pelaku usaha belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai	Berupaya memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk meningkatkan produksi HHBK	
				<i>Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu</i>						
				<i>Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Non Kayu sesuai SOP (Satuan : Dokumen)</i>	1	1.00	100.00	Belum adanya data pelaku usaha HHBK yang memiliki izin berusaha	Melakukan pendataan pelaku usaha HHBK yang belum dan telah memiliki izin berusaha	
				<i>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun</i>						
				<i>Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun</i>						
				<i>Tersusunnya Dokumen Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/Tahun Tersusunnya dokumen rencana pemenuhan bahan baku industri (RPBBI) secara manual dan online serta dokumen rencana pengolahan hasil hutan (Satuan : Dokumen)</i>	1	1.00	100.00	1. Pelaksanaan Kegiatan terkendala karena adanya kebijakan PPKM 2. Tidak Semua pemegang User ID RPBBI dan SIPUHH menyampaikan dokumen pengolahan Hasil Hutan Kayu 3. Belum tersosialisasinya peraturan perundang - undangan di bidang kehutanan 4. kebutuhan GA	1. Melaksanakan sosialisasi terkait peaturan perundang_undangan yang berlaku saat ini 2. melakukan pembinaan dan monitoring kepada pemegang user ID RPBBI dan SIPUHH 3. Koordinasi dengan KLHK terkait pelatihan /penyegaran GANISPHPL di Provinsi Banten 4. Mel	
				<i>Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun</i>						
				<i>Terlaksananya bimbingan teknis Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000M3/Tahun (Satuan : Kegiatan)</i>	1	1.00	100.00	1. Tidak semua PBPHHK dan FMU memiliki Legalitas hasil Hutan berupa SVLK 2. kebutuhan GANISPHPL yang aktif masih belum tercukupi	1. Mendorong PBPHHK dan FMU untuk memiliki Perizinan Berusaha di bid. kehutanan dan Legalitas SVLK 2. Koordinasi dengan KLHK terkait pemenuhan SVLK bagi PBPHHK dan FMU dan untuk Penyegaran/Pelatihan GANISPHPL	

			<i>Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</i>						
			<i>Tersusunnya dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) secara Manual dan Online serta Dokumen Rencana Pengolahan Hasil Hutan Terlaksananya fasilitasi rekomendasi IUIPHHK sesuai dengan standar dan pedoman yang berlaku (Satuan : Dokumen)</i>	1	1.00	100.00	1. Dengan adanya UU Cipta Kerja dan Turunannya maka Perizinan di Bid Kehutanan melalui sistem OSS belum tersosialisasikan 2. Untuk proses pengurusan perizinan OSS masih terkendala dengan persyaratan lain yang belum lengkap 3. banyak industri kehutanan ya	1. melaksanakan sosialisasi terkait pengurusan perizinan melalui sistem OSS berbasis Resiko 2. Mendorong Industri Kehutanan untuk mengurus perizinan Berusaha dengan melalui Fasilitasi Perizinan	
			Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara						
			<i>Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)</i>						
			<i>Tersusunnya Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTn-RHL) (Satuan : Dokumen)</i>	1	1.00	100.00	Proses pengajuan pembayaran di akhir tahun	Koordinasi inten dengan bagian keuangan	-
			<i>tersusunnya dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTn-RHL) dan rencana pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan (RPRHL) (Satuan : Dokumen)</i>	1	1.00	100.00	Belum tersedianya data lahan kritis sesuai dengan criteria baik eksisting maupun rencana.	Melakukan inventarisasi dan grown chek kelapangan.	
			<i>Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara</i>						
			<i>Terbangunnya Hutan rakyat diluar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi Banten (Satuan : Hektar)</i>	175	175.00	100.00	Merupakan kegiatan DAK, Kendala musim penghujan perkiraan di akhir tahun	Perubahan SPD kegiatan, waktu pelaksanaan di bulan Oktober TW 4 (Musim Penghujan)	-
			<i>Terbangunnya Hutan Rakyat diluar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi Banten (Satuan : Hektar)</i>	125	70.00	56.00	Belum mempunyai data kesesuaian potensi penyebaran tanaman kehutanan	Melakukan kajian potensi kesesuaian penyebaran potensi tanaman kehutanan	
			<i>Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara</i>						
			<i>Terlaksananya Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara (Satuan : batang)</i>	400	400.00	100.00	Ditambah 600 batang, capaian output kegiatan penghijauan lingkungan 1.000 batang bukan 400 batang	Target tidak sesuai	-

				<i>Terlaksananya Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara (Satuan : batang)</i>	160800	160,800.00	100.00	Belum memahami manfaat penghijauan bagi lingkungan dan pentingnya penghijauan lingkungan,	Sosialisasi manfaat dan pentingnya penghijauan lingkungan	
				<i>Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan</i>						
				<i>Terlaksananya Penerapan teknik konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan (Satuan : Unit)</i>	720	141.00	19.58	Kegiatan Pembuatan sumur resapan sebanyak 579 unit tidak dilaksanakan karena tidak ada kesepakatan terkait uang muka kegiatan antara PPK dan Kelompok Masyarakat Calon Pelaksana	Koordinasi dengan Inspektorat, BPKAD, KPPN dan KLHK	-
				<i>Terlaksananya penerapan teknik konservasi tanah dan air hutan dan lahan (Pembangunan Gully Plug di wilayah CDLHK-PSC) (Satuan : Unit)</i>	48	48.00	100.00	belum punya data base yang lengkap terkait kriteria lokasi untuk pembangunan konservasi tanah dan air yang ada di Provinsi Banten	Melakukan inventarisasi pemetaan wilayah kegiatan	
				<i>Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan</i>						
				<i>Terbangunnya unit percontohan pengembangan teknologi rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah Lebak dan Tangerang (Satuan : Unit)</i>	1	1.00	100.00	Kendala musim yang tidak menentu	Dilakukan penyiraman manual	-
				<i>Terlaksananya Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan (Agroforestry) (Satuan : Unit)</i>	2	2.00	100.00	Belum mempunyai data kesesuaian potensi penyebaran tanaman kehutanan	Melakukan kajian potensi kesesuaian penyebaran potensi tanaman kehutanan	
				<i>Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan</i>						
				<i>Terlaksananya pembinaan dan pengawasan rehabilitasi lahan di wilayah Lebak dan Tangerang (Satuan : Bulan)</i>	10	10.00	100.00	Tidak ada permasalahan yang berarti	Koordinasi dengan unsur terkait	-
				<i>terlaksananya pembinaan dan pengawasan rehabilitasi lahan di wilayah provinsi banten (Satuan : Bulan)</i>	12	12.00	100.00	Wawasan mengenai lingkungan hidup dan kehutanan masih kurang	Perlu di adakan Bimbingan teknis perihal lingkungan hidup dan kehutanan	
				<i>Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan</i>						
				<i>Tersedianya bibit tanaman hutan dan MPTS sesuai standar (Satuan : Batang)</i>	181750	181,750.00	100.00	serangan hama dan penyakit menyebabkan bibit banyak yang mati	mengoptimalkan alat dan bahan yang ada	
				<i>Perbenihan Tanaman Hutan</i>						
				<i>Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar</i>						

				<i>ditetapkannya pengada, pengedar benih/bibit tanaman hutan sesuai SOP (Satuan : Dokumen)</i>	1	1.00	100.00	Pengada Pengedar Benih /Bibit Tanaman Hutan di Provinsi Banten masih sedikit jumlahnya,	Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis terhadap Pengada Pengedar dan Pelaku usaha Perbenihan tanaman Hutan	
			<i>Sertifikasi Sumber Benih</i>							
				<i>Terlaksananya Sertifikasi sumber Benih Tanaman Kehutanan sesuai SOP (Satuan : Dokumen)</i>	1	1.00	100.00	Sumber Benih yang ada di Provinsi Banten milik Perum Perhutani, Masyarakat banyak yang tidak mau tanamannya dijadikan sebagai sumber benih karena tidak dapat diambil kayunya padahal apabila karena jika hanya menjual benihnya saja pemasarannya agak susah	Intensif melaksanakan Inventarisasi Calon Sumber Benih Tanaman Hutan dan Sosialisasi mengenai Sumber Benih Tanaman Hutan	
			<i>Sertifikasi Mutu Benih</i>							
				<i>Terlaksananya Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Kehutanan sesuai SOP (Satuan : Dokumen)</i>	1	1.00	100.00	Tenaga Sertifikator Mutu Benih Terbatas dan belum memiliki Sarana prasarana Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Hutan	Peningkatan SDM Sertifikasi Mutu Benih dan mengusulkan sarana prasarana Sertifikasi Mutu Benih tanaman hutan	
			<i>Sertifikasi Mutu Bibit</i>							
				<i>Terlaksananya Sertifikasi Mutu Bibit Tanaman Kehutanan sesuai SOP (Satuan : Dokumen)</i>	1	1.00	100.00	tidak ada	tidak ada	
			<i>Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit</i>							
				<i>Terlaksananya pengawasan peredaran Bibit/Benih Tanaman Kehutanan sesuai SOP (Satuan : Dokumen)</i>	1	1.00	100.00	Tenaga Pengawas Peredaran Benih/Bibit Tanaman Hutan masih terbatas	Peningkatan SDM melalui Diklat Pengawas Benih/Bibit tanaman hutan	
			<i>Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya</i>							
				<i>Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon (Satuan : Kelompok)</i>	3	3.00	100.00	- Keterbatasan Anggaran Dan Pemberlakuakan Ppkm	<i>Usulan Penambahan Anggaran Dan Optimalisasi Menggunakan Fasilitas Daring</i>	-
				<i>Peningkatan fungsi UPTD TAHURA (Satuan : %)</i>	12.5	12.50	100.00	<i>Sk Perluasan Tahura Belum Terbit Dari Klhk</i>	<i>Tindaklanjut Melalui Surat Gubernur Banten Ke Klhk</i>	-
				<i>Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon (Satuan : Kelompok)</i>	3	3	100.00	- Keterbatasan Anggaran Dan Pemberlakuakan Ppkm	<i>Usulan Penambahan Anggaran Dan Optimalisasi Menggunakan Fasilitas Daring</i>	
				<i>Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang (Satuan : krelompok)</i>	3	3	100.00	- Keterbatasan Anggaran Dan Pemberlakuakan Ppkm	<i>Usulan Penambahan Anggaran Dan Optimalisasi Menggunakan Fasilitas Daring</i>	

			Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam						
			<i>Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst</i>						
				<i>Tersedianya Dokumen Kajian Ekosistem Karst di Provinsi Banten (Satuan : Dokumen)</i>	1	1.00	100.00	Dalam pelaksanaannya belum bisa meninventarisir seluruh potensi ekosistem karst yang ada di provinsi banten	mengakarst melakukan inventarisasi potensi ekosistem
			<i>Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah</i>						
				<i>Tersusunnya Pemanfaatan Ekosistem lahan basah (Satuan : Dokumen)</i>	1	1.00	100.00	Sempadan situ berbatasan langsung dengan lahan milik masyarakat	Melakukan sosialisasi kepada pemilik lahan sebelum penanaman
			<i>Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi</i>						
				<i>Terlaksananya pengelolaan Daerah Penyangga dikawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi (Satuan : Dokumen)</i>	2	2.00	100.00	Jumlah bibit tanaman yang diberikan kepada masyarakat belum memadai	Menambah volume pengadaan bibit tanaman sesuai kebutuhan masyarakat
			<i>Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst</i>						
				<i>Terlaksananya Pengendalian Kerusakan dan pemeliharaan ekosistem Karst CDLHK LT (Satuan : Dokumen)</i>	1	0.00	0.00		
				<i>Terlaksananya Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst CDLHK PSC (Satuan : Dokumen)</i>	1	0.00	0.00	parasana dan saran untuk melaksanakan inventarisasi dan belum adanya data lokasi kawasan ekosistem karst wilayah cdlhk psc dikarenakan sub kegiatan baru	memberikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka kelancaran pelaksanaan melaksanakan kegiatan inventarisasi kawasan ekosistem karst dalam rangka perlindungan kawasan ekosistem bernilai penting wilayah cdlhk - psc
			<i>Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah</i>						
				<i>Terlaksananya Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah CDLHK LT (Satuan : Dokumen)</i>	1	1.00	100.00	Pelaksanaan bimtek tidak sesuai target karena ada kesalahan penempatan kode rekening untuk uang transportasi peserta, refocusing anggaran perjalanan dinas triwulan III & IV	Merubah kode rekening untuk uang transportasi peserta yang semula ada di kode rekening Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia menjadi kode rekening Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

				<i>Trlaksananya Pengendalian Kerusakan danPemeliharaan Ekosistem Lahan Basah CDLHK PSC (Satuan : Dokumen)</i>	1	0.00	0.00	sarana prasarana dan anggaran yang kurang memadai	malakukan koordinasi dengan kantor dinas dan kementerian LH dan K dalam rangka perlindungan kawasan ekosistem lahan basah	dalam rangka pengelolaan ekosistem lahan basah yang bisa memberikan dampak kepada masyarakat sekitar kawasan ,maka dibutuhkan anggaran kepada masyarakat dalam rangka pengembangan ekonomi masyarakat sekitar kawasan ekosistem lahan basah wilayah cdlhk - psc
				<i>Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi</i>						
				<i>Terlaksananya Penguatan Kapasitas danPemberdayaan Masyarakat di Kawasan BernilaiEkosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi CDLHK LT (Satuan : Dokumen)</i>	1	1.00	100.00	Pelaksanaan bimtek tidak sesuai target karena ada kesalahan penempatan kode rekening untuk uang transportasi peserta, refocusing anggaran perjalanan dinas triwulan III & IV	Merubah kode rekening untuk uang transportasi peserta yang semula ada di kode rekening Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia menjadi kode rekening Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	
				<i>Trlaksananya Penguatan Kapasitas danPemberdayaan Masyarakat di Kawasan BernilaiEkosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi CDLHK PSC (Satuan : Dokumen)</i>	1	0.00	0.00	belum ternenuk kelompok pada masyarakat sekitar kawasan ekosistem lesensial	membentuk FGD dengan masyarakat sekitar kawasan ekosistem esensial	dalam rangka pengelolaan ekosistem lahan basah yang bisa memberikan dampak kepada masyarakat sekitar kawasan ,maka dibutuhkan anggaran kepada masyarakat dalam rangka pengembangan ekonomi masyarakat sekitar kawasan ekosistem lahan basah wilayah cdlhk - psc
				<i>Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi</i>						

			<i>Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES</i>						
				<i>terlaksananya pengawasan dan pengendalian peredaran, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi sesuai dengan sop CDLHK LT (Satuan : Dokumen)</i>	1	1.00	100.00	Kurangnya data terkait penangkar satwa liar, Berkurangnya nominal untuk melaksanakan koordinasi	Penambahan Anggaran yang Mencukupi
				<i>Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Peredaran dan Pemanfaatan Tumbuhan dan satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan / atau tidak masuk dalam lampiran CITES CDLHK PSC (Satuan : Dokumen)</i>	1	1.00	100.00	sarana dan prasarana	melakukan koordinasi
			<i>Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi</i>						
			<i>Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA</i>						
				<i>Terlaksananya Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA (Satuan : Dokumen)</i>	1	2.00	200.00	Waktu pendataan penggarap kurang panjang untuk mendata keseluruhan kawasan Tahura	Dilaksanakan secara berkelanjutan pada setiap tahunnya
			<i>Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi</i>						
				<i>Terlaksananya Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi (Satuan : Dokumen)</i>	15	30.00	200.00	Kekurangan petugas lapangan	Pembagian tugas dalam pelaksanaan pengamanan dimaksimalkan kepada petugas lapangan yang sudah ada
			<i>Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi</i>						
				<i>Terlaksananya Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi (Satuan : Dokumen)</i>	1	1.00	100.00	Perlu dilaksanakan pengaplikasian ilmu terkait materi tersebut di lapangan	pengajuan anggaran untuk pelaksanaan pengaplikasian keilmuan tersebut
			<i>Pengawetan Koridor Hidupan Liar</i>						
				<i>Terlaksananya pengawetan Koridor Hidupan liar sesuai target (Satuan : Dokumen)</i>	1	1.00	100.00	Perlu dilaksanakan pengaplikasian ilmu terkait materi tersebut di lapangan	pengajuan anggaran untuk pelaksanaan pengaplikasian keilmuan tersebut
			<i>Pemulihian Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi</i>						

				<i>Terlaksananya Pemulihan ekosistem TAHURA Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi (Satuan : Dokumen)</i>	1	1.00	100.00	Pemilihan bibit yang kurang tepat dengan tujuan kegiatan yaitu pemulihan ekosistem	Konsultasi dan meminta masukan dari pimpinan dan masuarakat terkait jenis pohon yang akan ditanam	
				<i>Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi</i>						
				<i>Terlaksananya Pemanfaatan jasa lingkungan TAHURA Provinsi (Satuan : Dokumen)</i>	1	2.00	200.00	-	-	-
				<i>Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi</i>						
				<i>terlaksananya Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi (Satuan : Dokumen)</i>	1	2.00	200.00	-	-	-
				<i>Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi</i>						
				<i>Terlaksananya pemberdayaan masyarakat sekitarkawasan TAHURA dan peningkatan peransertamasyarakat sebagai mitra pengamanan kawasanTAHURA (Satuan : Desa)</i>	4	8.00	200.00	Masih belum menemukan kegiatan yang tepat untuk meningkatkan penguatan kapasitas masyarakat	Konsultasi dan meminta masukan dari pimpinan agar target kegiatan sesuai dengan tujuannya	
				<i>Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Provinsi</i>						
				<i>Terlaksananya Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Provinsi (Satuan : Dokumen)</i>	1	2.00	200.00	-	-	-
				<i>Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA</i>						
				<i>Tersusunnya Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA (Satuan : Dokumen)</i>	1	2.00	200.00	-	-	-
				<i>Perencanaan Pengelolaan TAHURA</i>						
				<i>Tersusunnya Rencana Pengelolaan Tahura (Satuan : Dokumen)</i>	1	1.00	100.00	Belum Terbitnya SK Perluasan Tahura Banten	sudah ditindaklanjuti dengan Surat gubernur Banten Ke KemenLHK	-
			Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan							
				<i>Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan, Pengelolaan dan Konservasi Hutan (Satuan : Kelompok)</i>	10	20.00	200.00	Keterbatasan Akses Kelompok Tani Dalam Menggunakan Gadget Dan Lokasi/akses Jalan Yang Sulit Ditempuh /rusak Menuju Lokasi Kelompok Tani Hutan	Optimalisasi Pengunaan Fasilitas Daring (gadget) Dan Sarana Pendukung / Kendaraan Ke Lokasi /jalan Yang Sulit Ditempuh	-

			Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan							
			<i>Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluhan Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan</i>							
				<i>Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluhan Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan (Satuan : Kelompok)</i>	2	2.00	100.00	pelaksanaan kegiatan dipecah per zonasi untuk mengikuti instruksi pembatasan kegiatan berkumpul dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19	Koordinasi dengan PEP dan Inspektorat	
			<i>Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan</i>							
				<i>Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan (Satuan : Kelompok)</i>	60	60.00	100.00	pelaksanaan kegiatan kelembagaan KTH terhambat dan tidak sesuai jadwal karena ada instruksi untuk membatasi kegiatan berkumpul) dalam upaya pencegahan Covid-19	Koordinasi dengan PEP dan Inspektorat	
			<i>Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial</i>							
				<i>Terlaksananya Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial (Satuan : Kelompok)</i>	2	2.00	100.00	pelaksanaan kegiatan terhambat dan kerap dilakukan pemindahan lokasi acara karena medan jalan tidak bisa dilalui kendaraan tipe kecil karna jalan berlumpur pasca hujan dan menanjak sehingga acara pun tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan	Koordinasi dengan Pendamping PS setempat dan Bagian umum	
			Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (das)							
				Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola DAS (Kawasan/DAS) (Satuan : %)	20	31,57	155.00	- Masih Rendahnya Aktivitas Forum Das - Masih Rendahnya Integrasi Pengelolaan Das/ Masih Bersifat Parsial	Optimalisasi Forum Das Sebagai Wadah Pengelolaan Das Berbasis Masyarakat - Peningkatan Peran Masyarakat , Swasta (industri) Dalam Peningkatan Fungsi Das	
			Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							
			<i>Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS</i>							

				<i>Tersusunnya penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS (Satuan : Dokumen)</i>	1	1.00	100.00	karena masih dalam kondisi pandemi covid-19, peserta yang hadir pada saat eksposur hasil studi lapangan tidak sesuai harapan	masukan terhadap penyusunan dokumen perencanaan dilakukan melalui media elektronik	
			<i>Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS</i>							
				<i>terlaksananya optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS (Satuan : Dokumen)</i>	1	1.00	100.00	Pendistribusian bibit tidak bisa dilakukan sekaligus dikarenakan lokasi yang jauh dan berat	pendistribusian dilakukan secara bertahap	
			<i>Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS</i>							
				<i>Terlaksananya Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS (Satuan : Kegiatan)</i>	1	1.00	100.00	Pengiriman terhambat karena terkendala akses komunikasi dengan KTH	dilakukan komunikasi secara langsung	
			<i>Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS</i>							
				<i>Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan DAS (Satuan : Kegiatan)</i>	1	1.00	100.00	Pengiriman terkendala akses jalan menuju lokasi	dilakukan pengiriman secara bertahap	
			<i>Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS</i>							
				<i>Terlaksananya Pembinaan Forum DAS (Satuan : Dokumen)</i>	1	1.00	100.00	Adanya refocusing anggaran sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan sesuai rencana	kegiatan dilaksanakan sesuai dengan anggaran serta berkoordinasi dengan instansi terkait	
			<i>Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS</i>							
				<i>Terlaksananya Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS (Satuan : Dokumen)</i>	1	1.00	100.00	Adanya refocusing anggaran sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan sesuai rencana	kegiatan dilaksanakan sesuai dengan anggaran serta berkoordinasi dengan instansi terkait	

Kepala Dinas,
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Banten



Wawan Gunawan, S.Sos.,M.Si
Nip.19671217 198803 1 006